BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2025

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
DAFTAR ISI

	HALAMAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	-
SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN	-
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
LAPORAN POSISI KEUANGAN	3
LAPORAN OPERASIONAL	4
LAPORAN ARUS KAS	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7 - 26

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. Heroe, Pramono & Rekan

SK Menteri Keuangan No. KEP- 243/KM.6/2001
Bapepam No. 211/STTD-AP/PM/1997,
Bank Indonesia No. 4/74/DPIP/DtB

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00106/2.0480/AU.5/11/0521-3/I/III/2026

Kepada Yth.
Dewan Pengurus
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
di Jakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan** ("BLU"), yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar informasi akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BLU tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BLU sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BLU dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal--hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BLU atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BLU.

JL. PROF. DR. SUPOMO SH. No. 3 - JAKARTA 12870
Telp. : 8303044 - 8303060 - 8297974 Fax. : 8295575
E-mail : pramono@kapheroe.co.id
Website : www.kapheroe.co.id

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.
Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

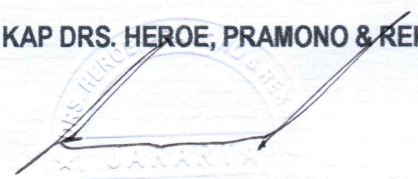
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal BLU.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BLU untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BLU tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian intern yang ditetapkan untuk tahun 2025 kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan No. LK/008/HPR/III/2026 dan No. LK/009/HPR/III/2026 masing-masing tertanggal 31 Maret 2026.

KAP DRS. HEROE, PRAMONO & REKAN





Drs. Benny L Tobing., Ak., MM., CPA., CA
Izin: AP. 0521
Jakarta, 31 Maret 2026

JL. PROF. DR. SUPOMO SH. No. 3 - JAKARTA 12870
Telp. : 8303044 - 8303060 - 8297974 Fax. : 8295575
E-mail : pramono@kapheroe.co.id
Website : www.kapheroe.co.id

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

KOTA BARU BANDAR
KEMAYORAN
BLOK B 11 KAV NO.4
JAKARTA 10610

TELP : (021) 65867830
FAX : (021) 65867832

EMAIL :
balaihatpen@dephub.go.id

SURAT PERNYATAAN PIMPINAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA PER 31 DESEMBER 2025
NO: KU. 204 /010/HATPEN - 2026

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama	:	**CAPT. RENATO JOELFIAN JOESAKI, SE, MA**
NIP	:	**19751106 200012 1001**
Jabatan	:	Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan
Alamat	:	Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B11 Kav No. 4 Jakarta 10610

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU Balai Kesehatan Penerbangan Tahun Buku 2025.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3.
   a. Semua informasi dalam lapongan keuangan BLU Balai Kesehatan Penerbangan telah dimut secara lengkap dan benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
   b. Laporan keuangan BLU Balai Kesehatan Penerbangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan, dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh seluruh BLU Balai Kesehatan Penerbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab atas sistem dan pengendalian internal, pencegahan dan penanggulan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan di lingkungan BLU Balai Kesehatan Penerbangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2026

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



CAPT. RENATO JOELFIAN JOESAKI, SE, MA
NIP. 19751106 200012 1001

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

	Catatan	2025			2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2a,3a	45.312.830.000	42.017.172.550	92,73%	43.369.921.427
Jumlah Pendapatan		**45.312.830.000**	**42.017.172.550**	**92,73%**	**43.369.921.427**
BELANJA	2b,3b				
Belanja Pegawai		6.906.497.000	6.891.140.357	99,78%	6.249.867.600
Belanja Barang		60.514.608.000	41.959.539.033	69,34%	44.026.594.386
Belanja Modal		5.716.076.000	5.573.469.208	97,51%	9.692.069.229
Jumlah Belanja		**73.137.181.000**	**54.424.148.598**	**88,87%**	**59.968.531.215**
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			**(12.406.976.048)**		**(16.598.609.788)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

	Catatan	31-12-2025	31-12-2024
Saldo Anggaran Lebih - Awal Tahun	4a	72.359.304.289	69.660.340.467
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih		-	-
Sub Total		72.359.304.289	69.660.340.467
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	4b	(12.406.976.048)	(16.598.609.788)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA			
Penyesuaian Transaksi BLU dan BUN:	4c		
Pendapatan Alokasi APBN		14.928.947.096	19.309.887.585
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		(12.313.989)	(12.313.975)
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Setelah Penyesuaian		2.509.657.059	2.698.963.822
Saldo Anggaran Lebih - Akhir Tahun	4d	**74.868.961.348**	**72.359.304.289**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

	Catatan	31-12-2025	31-12-2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	2g;5	-	35.122.736
Kas pada Badan Layanan Umum	2g;6	44.868.961.348	42.359.304.289
Investasi Jangka Pendek	2h;7	30.000.000.000	30.000.000.000
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2i;8	207.328.767	118.150.685
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	2j;9	761.885.593	949.852.271
Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		(19.642.138)	(20.581.971)
Persediaan	2k;10	1.042.178.450	1.171.415.178
Total aset lancar		76.860.712.020	74.613.263.188
ASET TETAP	2l;11		
Tanah		75.017.104.000	75.017.104.000
Gedung dan Bangunan		172.153.832.895	171.537.358.442
Peralatan dan Mesin		100.938.032.073	96.656.656.684
Jalan Irigasi dan Jaringan		384.726.000	384.726.000
Aset Tetap Lainnya		64.460.000	64.460.000
Akumulasi Penyusutan		(105.922.820.100)	(95.895.252.744)
Total aset tetap		242.635.334.868	247.765.052.382
ASET LAINNYA	2m;12		
Aset Tidak Berwujud		3.629.925.082	3.629.925.082
Aset Lain-lain		3.489.518.000	3.489.518.000
Akumulasi Amortisasi dan/Penyusutan		(5.026.147.082)	(5.026.147.082)
Dana Yang Dibatasi Penggunannya		850.372.564,00	878.810.785,00
Total aset lainnya		2.943.668.564	2.972.106.785
TOTAL ASET		**322.439.715.452**	**325.350.422.355**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	2n;13	909.830.164	961.994.521
Pendapatan Diterima Dimuka		17.500.000	17.500.000
Jumlah Kewajiban		927.330.164	979.494.521
EKUITAS	18		
Ekuitas		321.512.385.288	324.370.927.834
Jumlah Ekuitas		321.512.385.288	324.370.927.834
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**322.439.715.452**	**325.350.422.355**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

	Catatan	31-12-2025	31-12-2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan	2c;14		
Pendapatan Alokasi APBN		14.928.947.096	19.309.887.585
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		36.801.934.683	38.636.449.921
Pendapatan Hasil Kerjasama		2.090.517.400	2.652.645.280
Pendapatan Lainnya		2.805.056.453	2.049.323.056
Jumlah Pendapatan		**56.626.455.632**	**62.648.305.842**
Beban	2e;15		
Beban Pegawai		21.360.889.867	21.684.745.637
Beban Persediaan		5.253.484.789	5.314.548.858
Beban Barang dan Jasa		8.711.995.533	9.717.661.573
Beban Pemeliharaan		12.209.563.357	11.995.808.080
Beban Perjalanan Dinas		1.455.379.172	2.075.955.293
Beban Penyusutan dan Amortisasi		10.664.567.356	11.964.754.672
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		299.858	-
Total beban operasi bersih		**59.656.179.932**	**62.753.474.113**
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL		**(3.029.724.300)**	**(105.168.271)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	16		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		**-**	**-**
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		182.256.052	12.313.975
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(12.313.989)	(12.313.975)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**169.942.063**	**-**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**169.942.063**	**-**
SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		**(2.859.782.237)**	**(105.168.271)**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

	Catatan	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	17a		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Alokasi APBN		14.928.947.096	19.309.887.585
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		36.989.901.361	38.681.495.280
Pendapatan dari Jasa kepada Entitas Lain		-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama		2.090.517.400	2.652.645.280
Pendapatan BLU Lainnya		2.754.497.737	2.005.966.892
Pendapatan PNBP Umum		12.313.989	12.313.975
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka		-	17.500.000
Penerimaan dari pengembalian Belanja BLU TAYL		169.942.063	-
Jumlah Arus Kas Masuk		56.946.119.646	62.679.809.012
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		21.349.493.267	21.636.684.637
Pembayaran Barang		3.284.606.538	3.319.069.222
Pembayaran Jasa		5.320.276.490	5.813.573.056
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		4.913.592.449	4.924.014.289
Pembayaran Pemeliharaan		12.181.004.969	11.917.465.289
Pembayaran Jasa dan Kekhususan BLU		346.326.505	589.700.200
Pembayaran Perjalanan Dinas		1.455.379.172	2.075.955.293
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		12.313.989	12.313.975
Jumlah Arus Kas Keluar		48.862.993.379	50.288.775.961
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**8.083.126.267**	**12.391.033.051**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	17b		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Kas Keluar			
Perolehan Peralatan dan Mesin		4.918.375.389	8.224.867.500
Perolehan Gedung dan Bangunan		655.093.819	1.467.201.729
Investasi Jangka Pendek		-	30.000.000.000
Perolehan Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		5.573.469.208	39.692.069.229
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		**(5.573.469.208)**	**(39.692.069.229)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		**-**	**-**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	17c	**-**	**-**
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		-	35.122.736
Jumlah Arus Masuk Kas		-	35.122.736
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		35.122.736	-
Jumlah Arus Keluar Kas		35.122.736	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		**(35.122.736)**	**35.122.736**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS		2.474.534.323	(27.265.913.442)
KAS AWAL TAHUN		42.394.427.025	69.660.340.467
KAS AKHIR TAHUN		**44.868.961.348**	**42.394.427.025**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Mata Uang Rupiah Penuh)

	Catatan	31-12-2025	31-12-2024
Ekuitas Awal Tahun	18a	324.370.927.834	324.475.870.521
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas			
a. Surplus (Defisit) kegiatan operasional	18b	(2.859.782.237)	(105.168.271)
b. Koreksi yang menambah dan mengurangi ekuitas:			
- Koreksi Lain-Lain	18c	1.239.691	225.584
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Ekuitas		(2.858.542.546)	(104.942.687)
Ekuitas Akhir Tahun	18d	**321.512.385.288**	**324.370.927.834**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. U M U M

a. Profil dan Informasi Umum Balai Kesehatan Penerbangan

Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan (HATPEN) adalah salah satu satuan kerja (satker) atau UPT (Unit Pelaksana Teknis) eselon II Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) di bawah Kementerian Perhubungan yang keberadaannya didasarkan/ sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 55 Tahun 2017. HATPEN secara garis besar mempunyai 1 (satu) program yaitu Program melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personel penerbangan.

Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sebelumnya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 148/KMK.05/2016 tanggal 03 Maret 2016, Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan resmi menyandang status sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Visi dan Misi

Visi dari BLU Balai Kesehatan Penerbangan adalah "Terwujudnya Pelayanan Pemeriksaan Pengujian dan Pemeliharaan Kesehatan serta Pengujian Lingkungan Kerja Personel Penerbangan sesuai dengan Ketentuan Penerbangan

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut maka ditetapkan misi sebagai berikut:
- Memenuhi standar pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan serta hygiene dan sanitasi penerbangan.
- Meningkatkan profesionalisme pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kualitas SDM.
- Menyediakan saran dan prasarana pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan
- Menyediakan saran dan prasarana pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan penerbangan
- Mewujudkan kelembagaan yang efisien dan efektif.

Entitas BLU berdomisili dan berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 11 Kav.4 Jakarta Pusat.

b. Struktur Organisasi

Dewan Pengawas

Susunan dewan pengawas per 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Ketua	: Achmad Setiyo Prabowo	: Dra. Agustina Dani Endahwati, M.M.Tr
Anggota	: -	: Ir. Padmoyo Tri Wikanto, M.M
Anggota	: -	: Ir. Nafhan Syahroni, M.T

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 1 Tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penetapan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berikut susunan Dewan Pengawas setelah perubahan:

Ketua	: Agustinus Budi Hartono
Anggota	: Tatan Rustandi
Anggota	: Nugroho Wahyu Widodo, S.S.T., Ak

1. U M U M (lanjutan)

b. Struktur Organisasi (lanjutan)

Berdasarakan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia KU.103/1/2/MHB/2025 tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan pejabat sementara untuk menggantikan tugas Dewan Pengawas BLU Kementrian Perhubungan, masa jabatan sampai dengan Dewan pengawas definitif ditetapkan. Penetapan Dewan pengawas defenitif ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.SK.5039 tahun 2023 tanggal 7 September 2023, masa jabatan dewan pengawas sampai dengan bulan Februari 2025.

Berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berikut susunan pengurus di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, sebagai berikut:

Tahun 2025

- Kepala Balai Kesehatan Penerbangan : Capt. Renato Joelfian Joesaki, S.E., M.A
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha : Iskandar, S.Ap, MA
- Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan : dr. Maria Anitasari A
- Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama : Dwi Any Fatma, SH

Tahun 2024

- Kepala Balai Kesehatan Penerbangan : Capt. Renato Joelfian Joesaki, S.E., M.A
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha : Nurwigati Ningrum, SH
- Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan : dr. Maria Anitasari A
- Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama : Dwi Any Fatma, SH

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, BLU memiliki jumlah pegawai sebagai berikut:

	2025	2024
Pegawai:		
BLU PNS	80	82
BLU Non PNS	-	6
Honorer	-	12
PPPK	19	2
Jumlah Pegawai	**99**	**102**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang penyusunan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BLU Balai Kesehatan Penerbangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Keuangan Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dan operasi keuangan.

Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SAKTI-BMN). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja (satker) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SAKTI-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Dalam menyusun laporan keuangan, Balai Kesehatan Penerbangan menerapkan basis Akrual Akuntansi untuk penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Akuntansi

BLU Balai Kesehatan Penerbangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BLU Balai Kesehatan Penerbangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Balai Kesehatan Penerbangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Kesehatan Penerbangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU Balai Kesehatan Penerbangan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Belanja-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan.

c. Pendapatan - Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan LO pada BLU Balai Kesehatan Penerbangan sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah Pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan Denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai saldo awal lebih yang berasal dari nilai saldo awal lebih BLU Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan saldo awal lebih di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, Penyesuaian Pembukuan, serta koreksi-koreksi yang mempengaruhi saldo awal lebih dan SiLPA/SiKPA. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan saldo awal lebih disajikan sebagai Penyesuaian saldo awal lebih pada tahun berjalan.

e. Beban - Laporan Operasional (LO)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Laporan arus kas meliputi arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo dineraca. Jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Sisa Uang Muka dari KKPN yang belum dipertanggung jawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara pertanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain - lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- Kas di Bendahara Penerima merupakan Kas berupa uang tunai dan saldo rekening di bank yang di bawah tanggungjawab Bendahara penerimaan yang berasal dari pungutan PNBP (PNBP) yang sudah diterima.
- Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

h. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

i. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pos Pendapatan yang Masih Harus Diterima berasal dari saldo akhir Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada buku besar akrual yang merupakan transaksi akrual pengakuan pendapatan atas piutang yang belum jatuh tempo. Merupakan hak BLU yang belum diterima pembayarannya dan pendapatan BLU yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak BLU namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran. Contoh transaksi Pendapatan yang Masih Harus Diterima seperti pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil dari deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan tahunan.

j. Piutang Kegiatan Operasional / Non Operasional dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dalam membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan sesuai jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria yaitu :

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing - masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.06/2014 "Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara". Perhitungan penyisihannya yaitu :

Kualitas	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh	0,5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	- 1 Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

k. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan :

i) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
ii) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
iii) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

k. Persediaan (lanjutan)

Beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan pada masyarakat. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang persediaan.

l. Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai Aset Tetap disajikan sesuai harga perolehan/harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.06/2016 pasal 40 sebagai berikut :

- Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk peralatan dan mesin
- Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (satu juta rupiah), untuk gedung dan bangunan
- Nilai satuan minimum kapitalisasi tersebut tidak diperlukan berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional yang disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaanya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain - Lain pada pos aset lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan BLU Balai Kesehatan Penerbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi yaitu :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Persentase
- Gedung dan Bangunan	10 - 50 tahun	5% - 50%
- Peralatan dan Mesin	2 - 20 tahun	2% - 10%
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 - tahun	2,5 - 20%
- Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun	25%

Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap : i) Tanah; ii) Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan iii) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

m. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) , dan kas yang dibatasi penggunaanya.

Aset Tak Berwujud (ATB) meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang tidak diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

m. Aset Lainnya (lanjutan)

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: NOMOR 81/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tidak berwujud yang diestimasi yaitu:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Persentase
- Software Komputer	4 tahun	25,00%
- Franchise	5 Tahun	20,00%
- Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang	10 Tahun	10,00%
- Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa	20 tahun	5,00%
- Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun	4,00%
- Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50 Tahun	2,00%
- Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun	1,43%

n. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar/jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- Utang kepada pihak ketiga

  Utang kepada pihak ketiga merupakan kontra akun dari kas lainnya di bendahara pengeluaran. Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh BLU Balai Kesehatan Penerbangan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran /pelunasan /realisasi atas hak /perjanjian /komitmen tersebut.

- Pendapatan Diterima Dimuka

  Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

o. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pencapaian Realisasi Pendapatan TA 2025 tercapai sebesar 92,73% dari Estimasi Pendapatan sebesar Rp45.312.830.000,- Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp42.017.172.550,- dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp43.369.912.427,- mengalami penurunan sebesar Rp1.352.748.877,- atau sebesar 3,12%.

	TA 2025		%	TA 2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan PNBP Lainnya	-	12.313.989	100%	12.313.975
Pendapatan BLU	45.312.830.000	42.004.858.561	92,70%	43.357.607.452
Jumlah	**45.312.830.000**	**42.017.172.550**	**92,73%**	**43.369.921.427**

Rincian realisasi pendapatan sebagai berikut:

	2025	2024
Pendapatan PNBP Lainnya		
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.990.904	2.990.904
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	9.323.085	9.323.071
Sub Jumlah	12.313.989	12.313.975
Pendapatan BLU		
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	36.989.901.361	38.681.495.280
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	139.425.000	123.075.000
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.951.092.400	2.547.070.280
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.586.665.170	1.964.588.956
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	169.942.063	-
Pendapatan Lain-lain BLU	163.832.567	1.627.936
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	4.000.000	39.750.000
Sub Jumlah	42.004.858.561	43.357.607.452
Jumlah Realisasi Pendapatan	**42.017.172.550**	**43.369.921.427**

Kelebihan Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan kelebihan pembayaran biaya pemeliharaa kendaraan dinas sebesar Rp 61.576.863,- dan Kelebihan pembayaran biaya belaja *laundry* sebesar Rp 108.365.200,-.

b Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercapai target sebesar 88,87% dari Estimasi Belanja sebesar Rp73.137.181.000,- Realisasi Belanja pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp54.424.148.598,- dibandingkan dengan realisasi belanja yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp59.968.531.215,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp5.544.382.617,- atau 9,25%.

	TA 2025		%	TA 2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Pegawai	6.906.497.000	6.891.140.357	99,78%	6.249.867.600
Belanja Barang	60.514.608.000	41.959.539.033	69,34%	44.026.594.386
Belanja Modal	5.716.076.000	5.573.469.208	97,51%	9.692.069.229
Jumlah	**73.137.181.000**	**54.424.148.598**	**88,87%**	**59.968.531.215**

3. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

b Anggaran dan Realisasi Belanja (lanjutan)

Rincian anggaran dan realisasi belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi dan belanja modal yaitu :

	2025	2024
BELANJA PEGAWAI		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		
Belanja Gaji Pokok PNS	4.402.325.400	4.329.700.100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.502	64.074
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(94)	(230)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	282.322.720	279.961.690
Belanja Tunj. Anak PNS	93.658.276	92.813.094
Belanja Tunj. Struktural PNS	40.860.000	40.320.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	482.965.000	538.510.000
Belanja Tunj. PPh PNS	50.876.052	50.787.655
Belanja Tunj. Beras PNS	224.574.420	227.616.060
Belanja Uang Makan PNS	596.136.000	530.470.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	87.800.000	80.135.000
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	-	(575.240)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		
Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK	629.561.081	80.065.397
Sub Jumlah	**6.891.140.357**	**6.249.867.600**
BELANJA BARANG RUPIAH MURNI		
Belanja Jasa		
Belanja Langganan Listrik	1.464.371.780	1.545.018.014
Belanja Langganan Telepon	-	3.837.547
Belanja Langganan Air	-	48.573.900
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	900.000.000
Belanja Sewa	-	239.780.000
Belanja Pemeliharaan		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.680.502.420	9.430.883.030
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	674.707.950
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
Belanja Perjalanan Biasa	892.932.539	217.219.544
Jumlah dipindahkan	**8.037.806.739**	**13.060.019.985**

3. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

b Anggaran dan Realisasi Belanja (lanjutan)

	2025	2024
Jumlah dipindahkan	**8.037.806.739**	**13.060.019.985**
Belanja Barang BLU		
Belanja Gaji dan Tunjangan	14.458.352.910	15.386.817.037
Belanja Barang	3.280.610.538	3.319.069.222
Belanja Jasa	3.855.904.710	3.076.363.595
Belanja Pemeliharaan	6.500.502.549	1.811.874.309
Belanja Perjalanan	562.446.633	1.858.735.749
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	346.326.505	589.700.200
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	4.913.592.449	4.924.014.289
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	3.996.000	-
Sub Jumlah	**41.959.539.033**	**44.026.594.386**
BELANJA MODAL		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	4.918.375.389	8.224.867.500
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	655.093.819	1.467.201.729
Sub Jumlah	**5.573.469.208**	**9.692.069.229**
Jumlah Realisasi Belanja	**54.424.148.598**	**59.968.531.215**

Pada tahun anggaran 2025 terdapat penambahan belanja modal gedung dan bangunan BLU sebesar Rp655.093.819,-. Atas penambahan tersebut terdapat pengembalian belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 38.619.366,- berdasarkan Berita Acara penerimaan No. KU.501/1/5/STJ/2026 Tanggal 5 Februari 2026 *(Lihat catatan 11)* .

4. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. Saldo Anggaran Lebih - Awal

Rincian Saldo Anggaran Lebih - Awal yaitu :

	2025	2024
Kas pada Badan Layanan Umum	72.359.304.289	69.660.340.467
Jumlah	**72.359.304.289**	**69.660.340.467**

Saldo anggaran lebih awal tahun 2025 terbentuk dari saldo akhir kas pada BLU tahun 2024. Saldo anggaran lebih awal tahun 2025 sebesar Rp72.359.304.289,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.698.963.822,- atau 3,87% dibandingkan dengan saldo anggaran lebih awal tahun 2024 sebesar Rp69.660.340.467,-.

b. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yaitu :

	2025	2024
Penerimaan Negara Bukan Pajak	42.017.172.550	43.369.921.427
Dikurangi :		
Belanja Pegawai	6.891.140.357	6.249.867.600
Belanja Barang	41.959.539.033	44.026.594.386
Belanja Modal	5.573.469.208	9.692.069.229
Sub Jumlah	54.424.148.598	59.968.531.215
Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**(12.406.976.048)**	**(16.598.609.788)**

Saldo SiKPA merupakan hasil pengurangan antara akun pendapatan dengan akun belanja pada LRA tahun 2025. Saldo SiKPA tahun 2025 sebesar Rp12.406.976.048,- mengalami penurunan sebesar Rp4.191.633.740,- atau 25,25% dibandingkan dengan saldo SiKPA tahun 2024 sebesar Rp16.598.609.788,-.

4. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (lanjutan)

c. Penyesuaian Transaksi BLU Dengan BUN

Rincian Penyesuaian Transaksi BLU Dengan BUN yaitu :

	2025	2024
Pendapatan Alokasi APBN	14.928.947.096	19.309.887.585
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(12.313.989)	(12.313.975)
Jumlah	**14.916.633.107**	**19.297.573.610**

d. Saldo Anggaran Lebih - Akhir

Rincian Saldo Anggaran lebih - Akhir yaitu :

	2025	2024
Kas pada Badan Layanan Umum	44.868.961.348	42.359.304.289
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	30.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah	**74.868.961.348**	**72.359.304.289**

Saldo anggaran lebih akhir tahun 2025 terbentuk dari saldo akhir kas lainnya dan setara kas, kas pada BLU dan investasi jangka pendek sebesar Rp74.868.961.348,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.509.657.059,- atau 3,47%. dibandingkan dengan saldo anggaran lebih akhir tahun 2024 sebesar Rp72.359.304.289,- .

5. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

	2025	2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Norek. 00000006686783009	-	35.122.736
Jumlah	**-**	**35.122.736**

Merupakan saldo pada 31 Desember 2024 di rekening bendahara pengeluaran atas pembayaran kepada pemasok yang telah dilakukan pengembalian secara sistem oleh pihak bank. Pada tanggal 7 Januari 2025 telah dilakukan pembayaran kembali oleh bendahara pengeluaran. (*Lihat catatan 13 dan 17c*)

6. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

	2025	2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Norek. 00000006586783002	43.835.724.770	40.130.707.613
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Norek. 1210068000680	129.557	250.381
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Norek. 00000006686783098	83.983	439.253
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Norek. 00000006686783009	257.289	89.817,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Norek. 121000993361	1.032.765.749	2.227.817.225
Jumlah	**44.868.961.348**	**42.359.304.289**

7. INVESTASI JANGKA PENDEK - BADAN LAYANAN UMUM

	2025	2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Norek. 1889356403	30.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah	**30.000.000.000**	**30.000.000.000**

Deposito ARO dengan Nomor Bilyet PAB 1912877 sebesar Rp 30.000.000.000 tahun 2025 dengan jangka waktu investasi 3 (tiga) bulan terhitung dari 9 April 2025 - 9 Juli 2025 dan 9 Juli 2025 - 9 Oktober 2025 dengan suku bunga 6,25% per tahun, dan dirubah menjadi 6 (enam) bulan terhitung tanggal 9 Oktober 2025 - 9 April 2026 dengan suku bunga 5,00% per tahun dan tahun 2024 dengan jangka waktu investasi 6 (enam) bulan terhitung tanggal 9 Oktober 2024 - 9 April 2025 dengan suku bunga 6,25% per tahun.

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	2025	2024
Bunga Deposito	207.328.767	118.150.685
Jumlah	**207.328.767**	**118.150.685**

Deposito ARO dengan Nomor Bilyet PAB 1912877 yang ditempatkan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 1889356403 sebesar Rp 30.000.000.000. Pendapatan yang masih harus diterima tahun 2025 berupa bunga deposito sebesar 5,00% per tahun terhitung tanggal 9 Desember 2025 - 31 Desember 2025 (23 hari) dan tahun 2024 berupa bunga deposito sebesar 6,25% per tahun terhitung tanggal 9 Desember 2024 - 31 Desember 2024 (23 hari).

9. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL

	2025	2024
Piutang Bukan Pajak		
- PT Merpati Nusantara	15.912.271	15.912.271
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	365.460.000	330.140.000
- PT Lion Mentari Airlines	5.755.000	53.135.000
- PT Batik Air	9.295.000	26.375.000
- PT Wings Abadi Airlines	12.602.500	35.165.000
- PT Citilink Indonesia	188.905.000	477.045.000
- PT Super Air Jet	41.135.000	12.080.000
- PT BBN Airlines Indonesia	39.663.322	-
- Trans Nusa	71.657.500	-
- Reflexy	4.000.000	-
- Ikan Bakar Jayapura	7.500.000	-
	761.885.593	949.852.271
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(19.642.138)	(20.581.971)
Jumlah bersih	**742.243.455**	**929.270.300**

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih:

	Lancar 0,50%	Kurang Lancar 10%	Macet 100%	Total
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.827.300	-	-	1.827.300
PT Lion Mentari Airlines	28.775	-	-	28.775
PT Batik Air	46.475	-	-	46.475
PT Wings Abadi Airlines	63.012	-	-	63.012
PT Citilink Indonesia	944.525	-	-	944.525
PT Super Air Jet	205.676	-	-	205.676
PT BBN Airlines Indonesia	198.316	-	-	-
Trans Nusa	358.288	-	-	-
Reflexy	20.000	-	-	-
Ikan Bakar Jayapura	37.500	-	-	-
PT Merpati Nusantara	-	-	15.912.271	15.912.271
Jumlah	**3.729.867**	**-**	**15.912.271**	**19.642.138**

10. PERSEDIAAN

Terdiri dari:

	2025	2024
Barang Konsumsi	322.527.526	396.648.160
Barang untuk Pemeliharaan	-	327.700
Suku Cadang	130.242	-
Bahan Baku	457.253.704	600.965.589
Persediaan Lainnya	262.266.978	173.473.729
Jumlah	**1.042.178.450**	**1.171.415.178**

11. ASET TETAP

Mutasi aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025					
	Saldo Awal Tahun	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Penyesuaian	Saldo Akhir Tahun
Biaya Perolehan						
Tanah	75.017.104.000	-	-	-	-	75.017.104.000
Gedung dan Bangunan	171.537.358.442	655.093.819	(38.619.366)	-	-	172.153.832.895
Peralatan dan Mesin	96.656.656.684	4.918.375.389	(637.000.000)	-	-	100.938.032.073
Jalan Irigasi dan Jaringan	384.726.000	-	-	-	-	384.726.000
Aset Tetap Lainnya	64.460.000	-	-	-	-	64.460.000
	343.660.305.126	5.573.469.208	(675.619.366)	-	-	348.558.154.968
Akumulasi Penyusutan						
Gedung dan Bangunan	16.976.727.674	3.445.372.470	-	-	-	20.422.100.144
Peralatan dan Mesin	78.557.920.219	7.215.870.252	(637.000.000)	-	-	85.136.790.471
Jalan Irigasi dan Jaringan	328.044.851	3.324.634	-	-	-	331.369.485
Aset Tetap Lainnya	32.560.000	-	-	-	-	32.560.000
	95.895.252.744	10.664.567.356	(637.000.000)	-	-	105.922.820.100
Nilai Buku	**247.765.052.382**					**242.635.334.868**

Pada tahun 2025, pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 38.619.366 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran atas renovasi gedung yang diterima pada tanggal 17 Desember 2025 dan pengurangan pada Aset Peralatan dan Mesin merupakan penyerahan aset berupa 1 Unit mobil ambulance kepada kepala kantor unit Penyelenggara Bandar Udara Dewadaru - Karimunjawa berdasarkan Berita Acara. No. BA.025/HATPEN-2025 Tanggal 30 April 2025.

	2024					
	Saldo Awal Tahun	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Penyesuaian	Saldo Akhir Tahun
Biaya Perolehan						
Tanah	75.017.104.000	-	-	-	-	75.017.104.000
Gedung dan Bangunan	170.070.156.713	1.467.201.729	-	-	-	171.537.358.442
Peralatan dan Mesin	88.431.789.184	8.224.867.500	-	-	-	96.656.656.684
Jalan Irigasi dan Jaringan	384.726.000	-	-	-	-	384.726.000
Aset Tetap Lainnya	64.460.000	-	-	-	-	64.460.000
	333.968.235.897	9.692.069.229	-	-	-	343.660.305.126
Akumulasi Penyusutan						
Gedung dan Bangunan	13.545.621.618	3.431.106.056	-	-	-	16.976.727.674
Peralatan dan Mesin	70.031.666.236	8.526.253.983	-	-	-	78.557.920.219
Jalan Irigasi dan Jaringan	324.720.217	3.324.634	-	-	-	328.044.851
Aset Tetap Lainnya	28.490.001	4.069.999	-	-	-	32.560.000
	83.930.498.072	11.964.754.672	-	-	-	95.895.252.744
Nilai Buku	**250.037.737.825**					**247.765.052.382**

12. ASET LAINNYA

Terdiri dari:

a. Aset tak berwujud dan aset lain-lain

	2025					
	Saldo Awal Tahun	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Penyesuaian**	**Saldo Akhir Tahun**
Biaya Perolehan						
Aset Tak Berwujud	3.629.925.082	-	-	-	-	3.629.925.082
Aset Lain-Lain	3.489.518.000	-	-	-	-	3.489.518.000
	7.119.443.082	-	-	-	-	7.119.443.082
Akumulasi Penyusutan						
Aset Tak Berwujud	1.536.629.082	-	-	-	-	1.536.629.082
Aset Lain-Lain	3.489.518.000	-	-	-	-	3.489.518.000
	5.026.147.082	-	-	-	-	5.026.147.082
Nilai Buku	**2.093.296.000**					**2.093.296.000**

	2024					
	Saldo Awal Tahun	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Penyesuaian**	**Saldo Akhir Tahun**
Biaya Perolehan						
Aset Tak Berwujud	3.629.925.082	-	-	-	-	3.629.925.082
Aset Lain-Lain	3.489.518.000	-	-	-	-	3.489.518.000
	7.119.443.082	-	-	-	-	7.119.443.082
Akumulasi Penyusutan						
Aset Tak Berwujud	1.536.629.082	-	-	-	-	1.536.629.082
Aset Lain-Lain	3.489.518.000	-	-	-	-	3.489.518.000
	5.026.147.082	-	-	-	-	5.026.147.082
Nilai Buku	**2.093.296.000**					**2.093.296.000**

Aset tak berwujud merupakan system dan web Balai Kesehatan Penerbangan serta data base personil yang tidak dilakukan amortisasi karena BLU beranggapan memiliki masa manfaat tak terbatas.

b. Dana yang dibatasi penggunaannya

Merupakan saldo yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 atas dana untuk pekerjaan akhir dengan mekanisme RPATA, sebagai berikut:

	2025	**2024**
- Pembayaran building management	850.372.564	803.810.785
- Pembayaran fiber optik international	-	75.000.000
Jumlah	**850.372.564**	**878.810.785**

13. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

	2025	**2024**
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		
- Pembayaran fiber optik international	-	75.000.000
- Pembayaran building management	850.372.564	803.810.785
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		
- Uang makan pegawai PNS Bulan Desember 2025	59.457.600	46.661.000
- Uang makan pegawai PPPK Bulan Desember 2025	-	1.400.000
- Retur Pembayaran Bahan Narkoba	-	35.122.736
Jumlah	**909.830.164**	**961.994.521**

14. PENDAPATAN OPERASIONAL

Terdiri dari:

	2025	2024
Pendapatan Alokasi APBN	14.928.947.096	19.309.887.585
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	36.801.934.683	38.636.449.921
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU:		
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	139.425.000	123.075.000
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/BLU	1.951.092.400	2.529.570.280
Pendapatan BLU Lainnya:		
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.675.843.252	2.007.945.120
Pendapatan Lain-lain BLU	129.213.201	41.377.936
Jumlah	**56.626.455.632**	**62.648.305.842**

15. BEBAN OPERASIONAL

Terdiri dari :

a. Beban Pegawai

	2025	2024
Beban Gaji Pokok PNS	4.402.325.400	4.329.700.100
Beban Pembulatan Gaji PNS	61.408	63.844
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	282.322.720	279.961.690
Beban Tunj. Anak PNS	93.658.276	92.813.094
Beban Tunj. Struktural PNS	40.860.000	40.320.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	482.965.000	538.510.000
Beban Tunj. PPh PNS	50.876.052	50.787.655
Beban Tunj. Beras PNS	224.574.420	227.616.060
Beban Uang Makan PNS	596.163.050	577.131.000
Beban Tunjangan Umum PNS	87.800.000	79.559.760
Beban Gaji dan Tunjangan	14.532.937.910	15.386.817.037
Jumlah	**21.360.889.867**	**21.684.745.637**

b. Beban Persediaan

	2025	2024
Beban Persediaan konsumsi	1.039.328.758	629.856.530
Beban Persediaan bahan baku	4.135.312.503	4.476.486.122
Beban Persediaan Lainnya	78.843.528	208.206.206
Jumlah	**5.253.484.789**	**5.314.548.858**

15. BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)

c. Beban Barang dan Jasa

	2025	2024
Beban Langganan Listrik	1.464.371.780	1.545.018.014
Beban Langganan Telepon	-	3.837.547
Beban Langganan Air	-	43.892.995
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	900.000.000
Beban Sewa	-	239.780.000
Beban Jasa	3.855.904.710	3.076.363.595
Beban Barang	3.041.396.538	3.319.069.222
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	346.326.505	589.700.200
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	3.996.000	-
Jumlah	**8.711.995.533**	**9.717.661.573**

d. Beban Pemeliharaan

	2025	2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rupiah Murni	5.680.502.420	9.430.883.030
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	674.707.950
Beban Pemeliharaan BLU	6.500.502.549	1.811.874.309
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	3.752.950	11.771.200
Beban Persediaan suku cadang	24.805.438	-
Jumlah	**12.209.563.357**	**11.995.808.080**

e. Beban Perjalanan Dinas

	2025	2024
Beban Perjalanan Biasa	892.932.539	217.219.544
Beban Perjalanan	562.446.633	1.858.735.749
Jumlah	**1.455.379.172**	**2.075.955.293**

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.215.870.252	8.526.253.983
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.445.372.470	3.431.106.056
Beban Penyusutan Irigasi	380.600	380.600
Beban Penyusutan Jaringan	2.944.034	2.944.034
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	4.069.999
Jumlah	**10.664.567.356**	**11.964.754.672**

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	2025	2024
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	299.858	-
Jumlah	**299.858**	**-**

16. KEGIATAN NON OPERASIONAL

	2025	2024
Penjualan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Kegiatan Non Operasional		
Pendapatan dari Keg. Non Operasional Lainnya	182.256.052	12.313.975
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	(12.313.989)	(12.313.975)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	169.942.063	-
Jumlah	**169.942.063**	**-**

17. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	2025	2024
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Alokasi APBN	14.928.947.096	19.309.887.585
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	36.989.901.361	38.681.495.280
Pendapatan Hasil Kerja Sama	2.090.517.400	2.652.645.280
Pendapatan BLU Lainnya	2.754.497.737	2.005.966.892
Pendapatan PNBP Umum	12.313.989	12.313.975
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	17.500.000
Penerimaan dari pengembalian Belanja BLU TAYL	169.942.063	-
	56.946.119.646	62.679.809.012
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	21.349.493.267	21.636.684.637
Pembayaran Barang	3.284.606.538	3.319.069.222
Pembayaran Jasa	5.320.276.490	5.813.573.056
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	4.913.592.449	4.924.014.289
Pembayaran Pemeliharaan	12.181.004.969	11.917.465.289
Pembayaran Jasa dan Kekhususan BLU	346.326.505	589.700.200
Pembayaran Perjalanan Dinas	1.455.379.172	2.075.955.293
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	12.313.989	12.313.975
	48.862.993.379	50.288.775.961
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasional	**8.083.126.267**	**12.391.033.051**

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	2025	2024
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-
	-	-
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	4.918.375.389	8.224.867.500
Perolehan Gedung dan Bangunan	655.093.819	1.467.201.729
	5.573.469.208	9.692.069.229
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(5.573.469.208)**	**(9.692.069.229)**

17. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

c. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	2025	2024
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	35.122.736
	-	35.122.736
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	35.122.736	-
	35.122.736	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**(35.122.736)**	**35.122.736**

18. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	2025	2024
Ekuitas Awal	324.370.927.834	324.475.870.521
Surplus/(Defisit) LO	(2.859.782.237)	(105.168.271)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		
Koreksi Lain-lain	1.239.691	225.584
Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas	(2.858.542.546)	(104.942.687)
Ekuitas Akhir	**321.512.385.288**	**324.370.927.834**

a. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing - masing sebesar Rp324.370.927.834,- dan Rp324.475.870.521,-.

b. Surplus/ (Defisit) - Lo Tahun Berjalan

Jumlah Defisit - LO untuk periode tahun berjalan 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp2.859.782.237,- dan Rp105.168.271,-.

c. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan hasil jurnal beban penyisihan piutang. Koreksi Lain-lain untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.239.691,- dan Rp225.584,-.

d. Ekuitas Akhir Tahun

Nilai Ekuitas pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp321.512.385.288,- dan Rp324.370.927.834,-.

19. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2026.